



LAPORAN KINERJA
BRSDM

TRIWULAN I
2023

Kata Pengantar



Puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmatNya sehingga Laporan Kinerja Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Triwulan I Tahun 2023 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. Laporan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja dan pencapaian visi dan misi BRSDM selama Triwulan I Tahun 2023,

dengan penyajian mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini mempunyai beberapa fungsi antara lain memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian kinerja Triwulan I Tahun 2023 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BRSDM dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Selanjutnya, sejalan dengan

pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI secara umum dan BRSDM pada khususnya, telah menerapkan metode pengukuran kinerja yang terukur. Kinerja BRSDM diukur atas dasar penilaian indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Program (SP) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) BRSDM 2023 yang merupakan kontrak kinerja tahunan.

Selanjutnya, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh atas capaian kinerja pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan dukungan manajemen pelaksanaan tugas lainnya pada Triwulan I Tahun 2023. Akhirnya, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi dan sumbangsih semua pihak yang turut mendukung pencapaian kinerja BRSDM ini, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan berikutnya.

Jakarta, 27 April 2023
Kepala BRSDM,

Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi, M.Sc

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Ringkasan Eksekutif	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan	3
1.3. Tugas dan Fungsi	3
1.4. Keragaan SDM BRSDM	7
1.5. Sistematika Laporan Kinerja	8
1.6. Potensi dan Permasalahan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. Rencana Strategis	14
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023	19
2.3. Perjanjian Kinerja (PK)	20
2.4. Pengukuran Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1. Capaian Kinerja BRSDM Triwulan I Tahun 2023	26
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	26
3.3. Realisasi Anggaran BRSDM Tahun 2023	42
BAB IV PENUTUP	49
4.1. Kesimpulan	50
4.2. Permasalahan dan Rekomendasi	51
Lampiran	53

Daftar Tabel

Tabel 1	Rencana Kinerja BRSDM Tahun 2023	20
Tabel 2	Perjanjian Kinerja BRSDM Tahun 2023	20
Tabel 3	Capaian Kinerja BRSDM Tahun 2023	27
Tabel 4	Capaian IKU 4	30
Tabel 5	Satuan Kerja Lingkup BRSDM Berpredikat WBK	34
Tabel 6	Capaian IKM 11	35
Tabel 7	Capaian IKM 16	37
Tabel 8	Capaian IKM 17	38
Tabel 9	Rincian Jumlah Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BRSDM	39
Tabel 10	Capaian IKM 23	41
Tabel 11	Tabel Realisasi Anggaran BRSDM	42
Tabel 12	Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2023	43
Tabel 13	Perhitungan Efisiensi Anggaran BRSDM Tahun 2023	46

Daftar Gambar

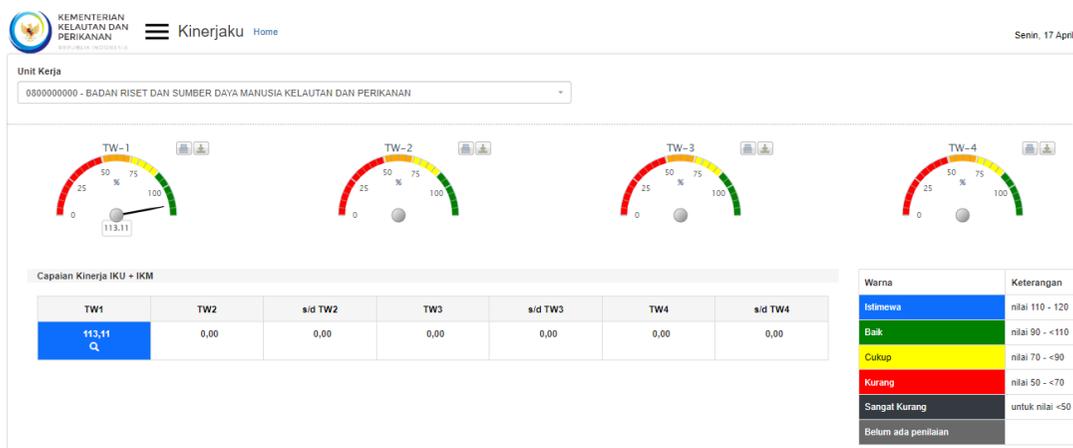
Gambar 1	Struktur Organisasi BRSDM	7
Gambar 2	Komposisi Pegawai	8
Gambar 3	Rincian PNS	8
Gambar 4	Capaian Kinerja BRSDM Triwulan I Tahun 2023	26
Gambar 5	Capaian Kinerja BRSDM Triwulan I Tahun 2023	50

Ringkasan Eksekutif

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019-2024 Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan pokok ke-3 yaitu Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan serta mengembangkan Inovasi IPTEK Bidang Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Nota Dinas Nomor 65 /BRSDM.1/RC.610/I/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Permohonan Pengesahan Perjanjian Kinerja Level 1 BRSDM Tahun 2023, Perjanjian Kinerja (KKP) BRSDM terdiri dari 7 (Tujuh) Sasaran Program dan 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) serta 14 Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Pengukuran capaian kinerja BRSDM tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan menggunakan aplikasi kinerjajaku <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh capaian kinerja BRSDM pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar 113,11%, sebagaimana *dashboard kinerjajaku* sebagai berikut:



Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, dari 23 Indikator Kinerja yang menjadi target BRSDM, terdapat 3 Indikator Kinerja berstatus biru dan 2 Indikator Kinerja capaian hijau atau telah mencapai/melampaui dari target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja BRSDM Triwulan I Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok) dengan target triwulan I sebanyak 584 Kelompok dan capaian sebesar 671 Kelompok (114,90%);
2. Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BRSDM (unit) dengan target triwulan I sebanyak 13 unit dan capaian 13 unit (100%);
3. Persentase Unit kerja Lingkup BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) dengan target triwulan I sebanyak 92% dan capaian sebesar 99,53% (108,18);
4. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BRSDM (%) dengan target triwulan I sebanyak 75% dan capaian sebesar 93,81% (120%);
5. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang) dengan target triwulan I sebanyak 1.869 orang dan capaian sebesar 2.514 orang (120%).

Secara umum kinerja BRSDM cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. IKU dengan Capaian Triwulan Melampaui Target Tahunan

Terdapat 2 Indikator Kinerja Utama dengan capaian melampaui target tahunannya, yaitu Persentase unit kerja Lingkup BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dan Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BRSDM. Terhadap capaian atas indikator ini diharapkan tidak terjadi penurunan pada triwulan berikutnya.

2. IKU dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IKU agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BRSDM. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BRSDM. Akhirnya, BRSDM berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat KP.



Halaman Kosong



Bab I

Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Tugas dan Fungsi
- 1.4. Keragaan SDM BRSDM
- 1.5. Sistematika Laporan Kinerja
- 1.6. Potensi dan Permasalahan

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum yakni:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
- 2) Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) Yang Berkelanjutan;
- 3) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan;
- 4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim;
- 5) Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh;
- 6) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
- 7) Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah.

Lebih lanjut, arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2019-2024 ditetapkan dengan memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional, yakni SDM, sektor unggulan, dan kewilayahan. Sektor kelautan dan perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang penjabarannya dilaksanakan KKP dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir. Peran KKP yang dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan serta tugas KKP dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional/Nawa Cita melalui kebijakan pokok yang diarahkan:

- 1) Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 2) Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

1.2 Tujuan

Laporan Kinerja BRSDM triwulan I Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja BRSDM triwulan I Tahun 2023 ini, bertujuan:

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada triwulan I Tahun 2023.
- 2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BRSDM untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BRSDM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

BRSDM mempunyai tugas menyelenggarakan riset di bidang kelautan dan perikanan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, dengan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis, rencana, program riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan, serta program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- 2) pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan, serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;

- 3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan, serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- 4) pelaksanaan administrasi BRSDM; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, BRSDM didukung oleh unit kerja eselon II sebagai berikut:

A. Sekretariat Badan

Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BRSDM dengan tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan badan. Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan kinerja, penyiapan bahan pimpinan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- 2) Koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 3) Koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- 4) Koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
- 5) Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan.

Susunan organisasi Sekretariat Badan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Pusat Riset Kelautan

Pusat Riset Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BRSDM, dengan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pelaksanaan, serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan. Pusat Riset Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kewilayahan, mitigasi, adaptasi, dan konservasi kelautan, serta sumber daya laut;
- 2) Penyiapan pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kewilayahan, mitigasi, adaptasi, dan konservasi kelautan, serta sumber daya laut;
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset kelautan; dan
- 4) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, seluruh peneliti di lingkungan BRSDM melakukan penyesuaian dengan melakukan perpindahan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, sehingga akan terjadi transformasi kelembagaan Pusat dan UPT lingkup BRSDM.

C. Pusat Riset Perikanan

Pusat Riset Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BRSDM, dengan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Perikanan. Pusat Riset Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemulihan sumber daya ikan, dan teknologi alat dan mesin perikanan;
- 2) penyiapan pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemulihan sumber daya ikan, dan teknologi alat dan mesin perikanan;
- 3) penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset perikanan; dan
- 4) pelaksanaan urusan ketatausahaan

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, seluruh peneliti dilingkungan BRSDM melakukan penyesuaian dengan melakukan perpindahan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, sehingga akan terjadi transformasi kelembagaan Pusat dan UPT lingkup BRSDM.

D. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BRSDM, dengan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan kelautan dan perikanan. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang perencanaan dan evaluasi, kelembagaan dan ketenagaan, serta penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- 2) penyiapan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan evaluasi, kelembagaan dan ketenagaan, serta penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- 3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan kelautan dan perikanan; dan
- 4) pelaksanaan urusan ketatausahaan.
- 5) Susunan organisasi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

E. Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

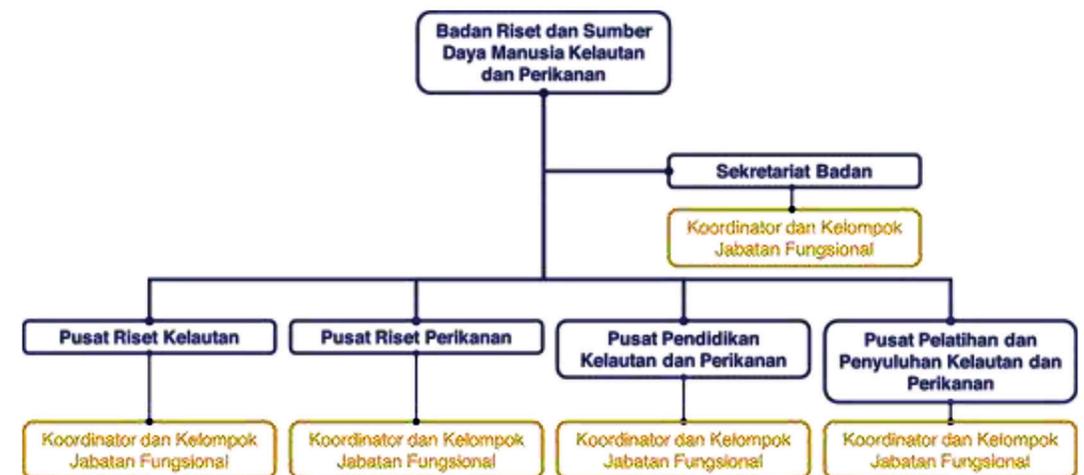
Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BRSDM, dengan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan. Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- 1). penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang perencanaan dan evaluasi, serta penyelenggaraan pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan;

- 2). penyiapan pelaksanaan di bidang perencanaan dan evaluasi, serta penyelenggaraan pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 3). penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan; dan
- 4). pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Susunan organisasi Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi BRSDM sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 48/PERMEN-KP/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkup KKP, sebagai berikut:



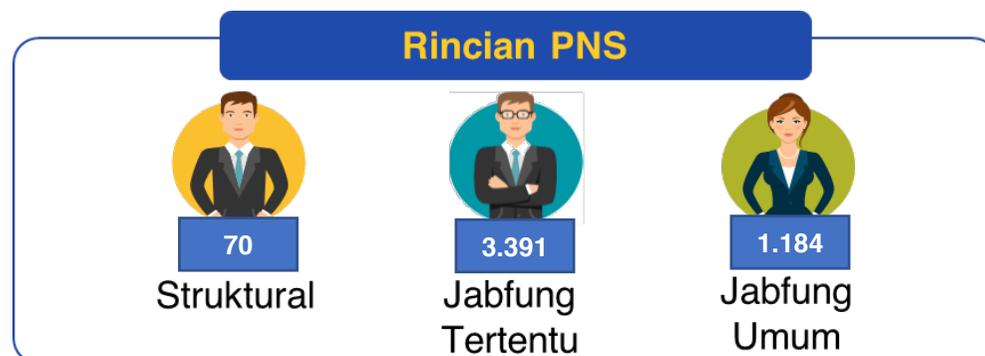
Gambar 1. Struktur Organisasi BRSDM

1.4 Keragaan SDM BRSDM

BRSDM memiliki 44 satuan kerja dengan didukung oleh 7.269 pegawai yang terdiri dari 4.734 PNS, 1.451 Penyuluh Perikanan Bantu/PPB dan 1.070 Tenaga Kontrak. Komposisi dari pegawai PNS yang berada di Pusat dan Daerah, sebagai berikut



Gambar 2. Komposisi SDM BRSDM



Gambar 3. Rincian PNS BRSDM

1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Tahun 2023.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang BRSDM seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di BRSDM.
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis BRSDM 2019-2024, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja BRSDM Tahun 2023 serta Pengukuran Kinerja.

4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya
5. **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi.
6. **Lampiran**, berisi lampiran Perjanjian Kinerja dan hal lain yang dianggap penting.

1.6 Potensi dan Permasalahan

1) Potensi

Keberadaan SDM dan IPTEK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan riset, pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan, riset berperan menjadi pendorong penerapan teknologi, dengan keberadaan 5 unit eselon II yaitu 2 (dua) Pusat Riset (Riset Kelautan dan Riset Perikanan) dan 3 (tiga) Balai Besar, 8 (delapan) Balai dan 5 (lima) Loka, namun dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang berdirinya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terjadi penggabungan pegawai sehingga seluruh peneliti diintegrasikan ke BRIN. Peran BRSDM di bidang pendidikan didukung keberadaan 20 satuan pendidikan, yang terdiri atas 1 (satu) Sekolah Tinggi, 9 (sembilan) Politeknik KP, 9 (Sembilan) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) dan 1 (satu) Akademi Komunitas, dengan tenaga pendidik berjumlah 502 orang terdiri atas 95 guru dan 433 dosen, dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan *pendekatan teaching factory* dengan 70% praktek dan 30% teori. Satuan pendidikan KP menerima peserta didik dari anak pelaku utama sebesar 44% pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 55% pada tahun 2024.

Peran BRSDM di bidang pelatihan didukung dengan keberadaan 5 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP), 1 Balai Diklat Aparatur (BDA), 413 Pusat Pelatihan Perikanan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), dan 63 Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang tersebar di seluruh

Indonesia, disamping itu didukung dengan jumlah tenaga pelatih terdiri atas 34 widyaiswara dan 122 instruktur.

Kegiatan Pelatihan ditujukan bagi masyarakat KP dengan jenis pelatihan bidang penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, konservasi, mesin perikanan, pelatihan inovatif dan pelatihan lainnya sesuai kebutuhan kompetensi yang akan ditingkatkan, yang dapat dilengkapi dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan menggunakan standar SKKNI, KKNi dan SKK. Sedangkan pelatihan aparatur ditujukan bagi aparatur negara, meliputi pelatihan struktural (dalam jabatan dan prajabatan), pelatihan fungsional, dan pelatihan teknis kelautan dan perikanan bagi aparatur di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta aparatur daerah dalam rangka mendukung program dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk mempercepat proses alih teknologi dan memperkuat kapasitas kelompok pelaku utama/pelaku usaha, pada tahun 2023 terdapat 3.381 orang Penyuluh Perikanan yang terdiri atas 1.587 orang Penyuluh Perikanan bantu, 2.294 orang penyuluh PNS, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai tindaklanjut dari amanah ditetapkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan selanjutnya menjadi urusan Pemerintah Pusat yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Setelah melalui serangkaian proses identifikasi dan verifikasi personel, pendanaan, prasarana dan dokumen (P3D), maka sejak Juli 2017 seluruh Penyuluh Perikanan pengangkatan daerah secara status berubah menjadi Penyuluh Pusat.

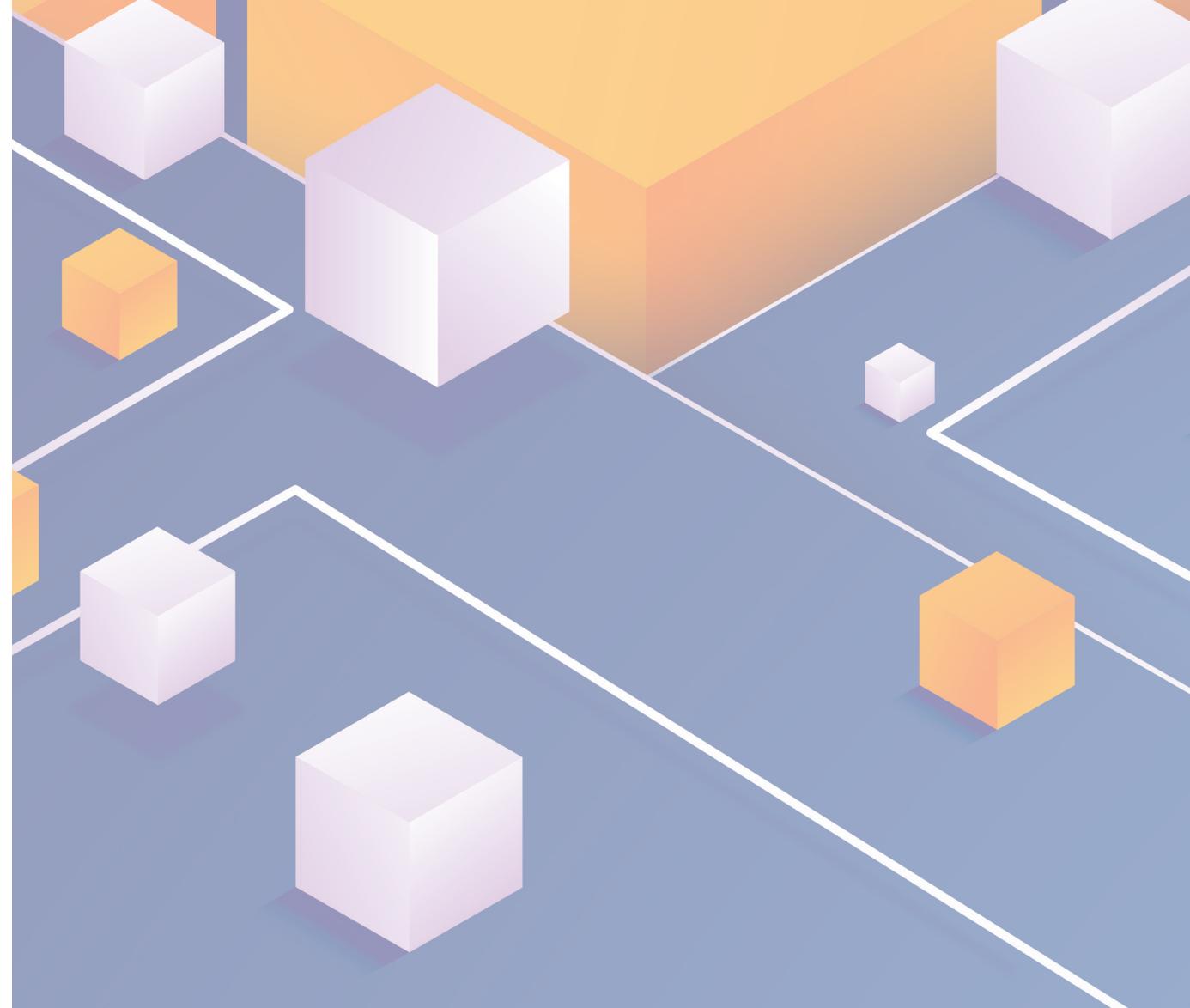
2) Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset, pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan untuk mendukung pembangunan KP antara lain:

- 1) Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang berdirinya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terjadi penggabungan pegawai sehingga seluruh peneliti diintegrasikan ke BRIN sehingga BRSDM akan mengalami transformasi kelembagaan dan tugas dan fungsi.
- 2) Masih kurangnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang riset dan SDM sebagai instrumen penjaminan mutu riset dan pengembangan SDM;
- 3) Kerangka regulasi terkait kerangka kualifikasi nasional Indonesia belum memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan aparatur di bidang KP
- 4) Jumlah, sebaran dan kompetensi tenaga pelatih (instruktur dan widyaiswara) serta penyuluh perikanan masih terbatas dan belum memenuhi kebutuhan di lapang;
- 5) Penyediaan kurikulum/modul pelatihan dan penyuluhan belum sepenuhnya terstandarisasi yang berbasis digital yang mudah diakses baik nasional maupun International;
- 6) Usaha yang dikembangkan skala kecil, individual dan variatif, tersebar tidak dalam suatu kawasan/wilayah pengembangan serta masih menggunakan teknologi terapan konvensional;
- 7) Penyuluh perikanan masih sulit mendapatkan akses terhadap teknologi, informasi pasar, modal dan sumberdaya lainnya;
- 8) Penyelenggaraan penyuluhan sebagian polivalen, jejaring kerja terbatas dan penyebarluasan teknologi dari sumber ke pengguna teknologi belum berjalan secara efektif.



Halaman Kosong



Bab II

Perencanaan Kinerja

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Rencana Kerja Tahunan
- 2.3. Perjanjian Kinerja
- 2.4. Pengukuran Kinerja

2.1 Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke 4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional.

Misi tersebut selaras dengan salah satu sasaran pokok RPJPN 2005-2025, yaitu "Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional". RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) tahun 2020-2024, mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Visi kementerian kelautan dan perikanan pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang

berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi KKP menjadi penting dengan keberadaan BRSDM KP sebagai lembaga pendukung untuk mencapai tujuan RPJMN tahap IV. Peran strategis keberadaan BRSDM KP yaitu mendukung visi dan misi KKP melalui kegiatan riset dan pengembangan SDM.

Peran strategis BRSDM KP meliputi:

- 1) Merumuskan perencanaan pembangunan KP nasional melalui penyediaan hasil riset inovatif dan SDM kompeten;
- 2) Menyelenggarakan riset dan pengembangan SDM yang mengikuti perkembangan era globalisasi dan ekonomi digital;
- 3) Menghasilkan riset inovatif dan implementatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, serta mencetak SDM unggul yang mampu bersaing sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/industri;
- 4) Melaksanakan pengelolaan alih teknologi bidang KP secara efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- 5) Melakukan sharing Knowledge Base Management System (BMS) dalam mengaplikasikan hasil riset KP;
- 6) Meningkatkan pendidikan SDM dan perluasan akses pendidikan vokasi bagi anak pelaku usaha KP;
- 7) Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan/atau sertifikasi secara optimal;
- 8) Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar/peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian, dan keberlanjutan sumber daya KP;
- 9) Mewujudkan tata kelola riset dan SDM yang baik dan melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri;
- 10) Meningkatkan kontribusi PNB (royalti dan Hak Kekayaan Intelektual/HAKI) melalui hasil riset serta pengembangan SDM.

Tugas dan fungsi BRSDM KP sebagai penyelenggara riset inovatif di bidang KP dan pengembangan SDM kompeten, memberikan dampak pada peningkatan ekonomi. Hasil riset yang inovatif dan SDM yang kompeten menjadi faktor utama keberhasilan pengelolaan sumber daya KP secara berkelanjutan. Dinamika lingkungan strategis

pembangunan KP harus disikapi BRSDM KP dengan mengoptimalkan kekuatan internal, serta mengubah tantangan yang dihadapi menjadi peluang.

Perkembangan IPTEK yang pesat di era revolusi industri 4.0 dan era sosial (*society*) 5.0 menuntut adanya perubahan tatanan kehidupan baru yang berpusat pada manusia (*human-centered*) serta berbasis teknologi (*technology based*). *Cyber-physical system* (CPS) dalam Industri 4.0 merupakan integrasi antara *physical system*, komputasi dan juga *network/komunikasi*, sedangkan *society 5.0* merupakan penyempurnaan dari CPS menjadi *cyber-physical-human systems*. Pada era *society 5.0* manusia tidak hanya dijadikan obyek (*passive element*), tetapi berperan aktif sebagai subyek (*active player*) yang bekerja bersama *physical system* dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut, interaksi antara mesin (*physical system*) dan manusia diperlukan untuk menjaga keseimbangan maupun keharmonisan. Situasi ini akan memberikan peluang bagi BRSDM KP untuk berinovasi dalam hal teknologi, struktur organisasi/kelembagaan, dan aturan/kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, BRSDM KP melakukan penyusunan Renstra 2020-2024, untuk mendukung terwujudnya visi dan misi KKP serta sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 yaitu mewujudkan masyarakat sektor KP yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

A. Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi KKP 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk

mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong"

Visi BRSDM pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

B. Misi

Misi BRSDM adalah menjalankan misi Presiden dan KKP dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, KKP mendukung 4 (empat) misi yaitu :

- 1) Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
- 2) Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
- 3) Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- 4) Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

C. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BRSDM KP, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

- 1) Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

- 2) Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan.
- 3) Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
- 4) Menghasilkan dan mengembangkan riset dan inovasi mendukung pembangunan berkelanjutan.
- 5) Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial riset dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik

D. Sasaran Program

Renstra BRSDM Tahun 2019-2024 menjelaskan bahwa sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program riset dan SDM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh BRSDM sebagai suatu outcome/impact dari program yang dilaksanakan, dengan menggunakan pendekatan metoda *Logical Framework*. Sasaran Strategis yang akan dicapai di level 0 KKP adalah "Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat", dengan Indikator Kinerja "Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya", setiap tahun sebanyak 1.800 kelompok selama tahun 2020-2024.

Sasaran strstegis kedua (SS-2) yang akan dicapai dilevel 0 KKP adalah "Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat" dengan Indikator Kinerja:

- 1) Nilai PNBK Sektor KP, dengan target setiap tahun sebanyak 1,87 Triliun selama 2020-2024.
- 2) Tenaga Kerja yang terlibat di sektor KP, dengan target setiap tahun sebanyak 688.422 orang selama 2020-2024.

Sasaran Strategis ke empat (SS-4) yang akan dicapai dilevel 0 KKP adalah "Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat" dengan Indikator Kinerja Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan pada dunia usaha dan dunia industri, dengan target setiap tahun 65% selama 2020-2024.

Untuk melaksanakan pencapaian SS sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan

outcome BRSDM melalui Sasaran Strategis ke Sembilan (SS-9) "Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas" dengan indikator kinerja :

- 1) Indeks Profesionalisme ASN BRSDM dari 72 pada tahun 2020 menjadi 76 pada tahun 2024.
- 2) Persentase unit kerja BRSDM yang menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar 82% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun 2024.
- 3) Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi BRSDM dari 30 pada tahun 2020 menjadi 34 pada tahun 2024.
- 4) Penilaian Mandiri AKIP BRSDM, dari A pada tahun 2020 menjadi AA pada tahun 2024.
- 5) Level Maturitas SPIP BRSDM, 3 pada tahun 2020 sampai 2024.
- 6) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRSDM dari Baik (88) pada tahun 2020 menjadi Sangat Baik (90) pada tahun 2024.
- 7) Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRSDM dibandingkan realisasi anggaran sebesar $\leq 1\%$ setiap tahunnya dari 2020 sampai 2024.
- 8) Jumlah unit kerja BRSDM berpredikat menuju WBK (satker, kumulatif) pada tahun 2020 sebanyak 10 satker, sampai dengan 2024 sebanyak 13 satker lingkup BRSDM.
- 9) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BRSDM, sebesar 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024.
- 10) Nilai Kinerja Anggaran BRSDM dengan target sebesar 85 pada tahun 2020 menjadi 89 pada tahun 2024.

2.2 Rencana Kerja Tahun 2023

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja BRSDM Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1. Rencana Kerja BRSDM Tahun 2023

NO	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp.000)
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	327.300.950
	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	198.834.940
	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	128.466.010
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	5.373.250
	Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan	2.800.000
	Inkubasi Bisnis Kelautan dan Perikanan	2.323.250
	Pengujian Kelayakan Teknologi Kelautan dan Perikanan	250.000
3	Program Dukungan Manajemen	1.050.962.966
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BRSDMKP	1.039.462.966
	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	11.500.000
Total Anggaran BRSDM Tahun 2023		1.383.637.166

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Dalam upaya untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi BRSDM harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Berdasarkan, visi dan misi tersebut selanjutnya dirumuskan sasaran program BRSDM.

Pada tahun 2023 Perjanjian Kinerja Level 1 BRSDM, memiliki 7 Sasaran Program dan 9 Indikator Kinerja Utama serta 14 Indikator Kinerja Manajerial. Rincian dan target PK pada tahun 2023, sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BRSDM Tahun 2023

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	1	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	70

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
		2	Nilai PNBP BRSDM (Rupiah Miliar)	24,731
2	SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan)	3	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	392
3	Kelompok Kelautan dan Perikanan Mandiri yang Dibentuk	4	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)	3.000
		5	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)	1.800
		6	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRSDM (orang)	12.342
4	Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat	7	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (Desa Perikanan Cerdas) (desa)	7
5	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan	8	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	14
6	Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan	9	Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan (Kebijakan)	11
7	Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BRSDM	10	Nilai PM PRB Lingkup BRSDM (nilai)	33,5

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		11 Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BRSDM (unit)	15
		12 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRSDM dibandingkan Realisasi Anggaran BRSDM TA 2022 (%)	≤0,5
		13 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BRSDM (indeks)	75
		14 Nilai PM SAKIP BRSDM (nilai)	80,5
		15 Nilai Struktur dan Proses Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BRSDM (nilai)	3,1
		16 Persentase Unit kerja Lingkup BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92
		17 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BRSDM (%)	75

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		18 Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan BRSDM (%)	75
		19 Nilai IKPA Lingkup BRSDM (nilai)	89
		20 Nilai NKA Lingkup BRSDM (nilai)	86
		21 Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup BRSDM (%)	77,5
		22 Persentase Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BRSDM (%)	77,5
		23 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)	5.005

2.4 Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BRSDM Tahun 2023, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi Indikator Kinerja, akan diperoleh indeks capaian Indikator Kinerja. Penghitungan indeks capaian Indikator Kinerja perlu memperhitungkan jenis polarisasi Indikator Kinerja yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian Indikator Kinerja adalah:

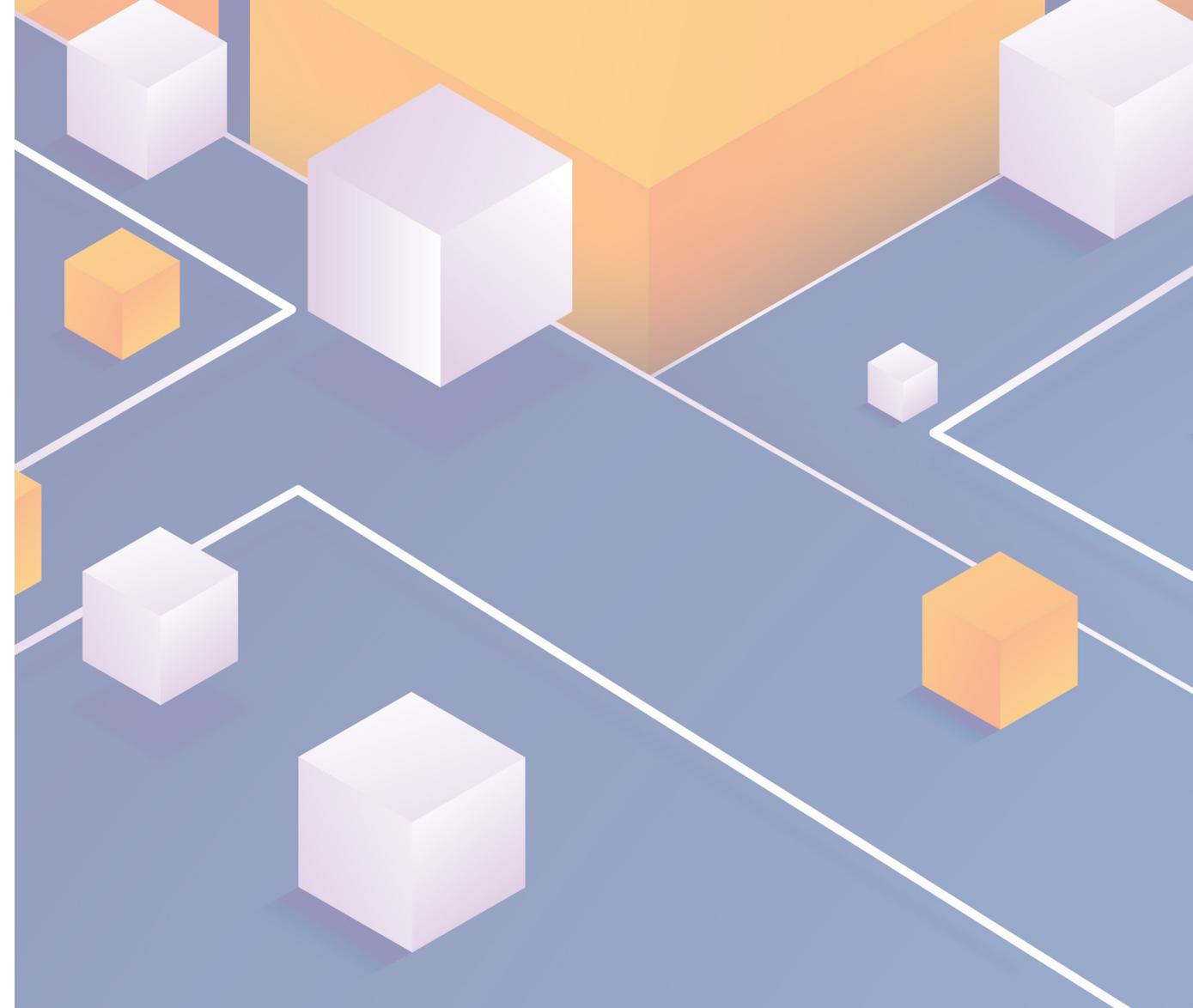
- 1) Angka maksimum adalah 120;
- 2) Angka minimum adalah 0;
- 3) Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;

4) Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Metode pengukuran kinerja lingkup BRSDM dilakukan secara berkala per triwulan. Pengukuran kinerja dilaksanakan oleh tim yang melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja sebagaimana Surat Keputusan Kepala BRSDM Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 dan triwulanan tahun 2023. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dari level 3 unit pelaksana teknis sampai ke level 2 pusat-pusat dan sekretariat.



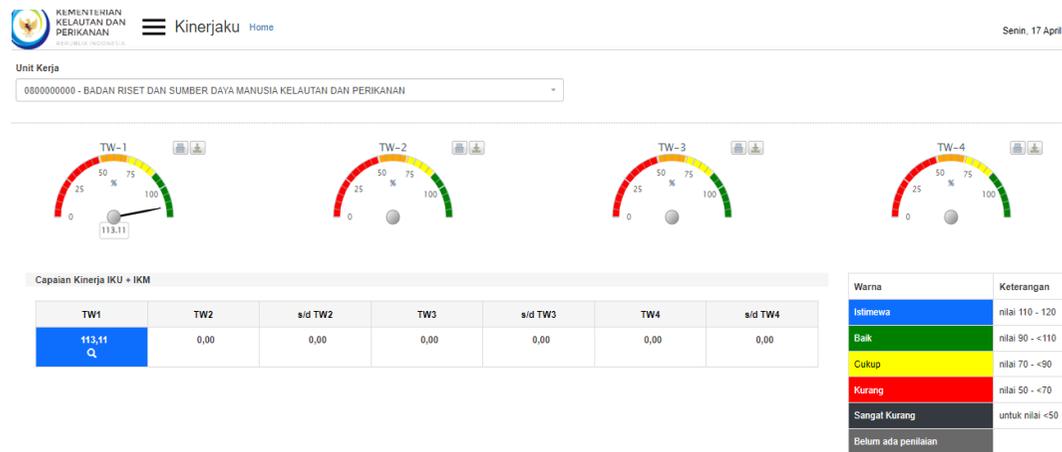
Bab III

Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Prestasi Indikator Kinerja Utama Triwulan III Tahun 2022
- 3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja
- 3.3 Akuntabilitas Keuangan

3.1 Capaian Kinerja BRSDM Triwulan I Tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja BRSDM Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan aplikasi *kinerjaku* pada tautan <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRSDM Triwulan I Tahun 2023 sebesar 113,11 %, sebagaimana pada *dashboard kinerjaku* sebagai berikut:



Gambar 4. Capaian Kinerja BRSDM Triwulan I 2023

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BRSDM. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-

sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak kinerja pada Tahun 2023 dapat tercapai.

Tabel 3. Capaian Kinerja BRSDM Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023	Target Triwulan I	Capaian Triwulan I	%
1	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	70			
2	Nilai PNBP BRSDM (Rupiah Miliar)	24,731			
3	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	392			
4	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)	3.000	584	671	114,90
5	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)	1.800			
6	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRSDM (orang)	12.342			
7	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (Desa Perikanan Cerdas) (desa)	7			
8	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	14			
9	Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan (Kebijakan)	11			
10	Nilai PM PRB Lingkup BRSDM (nilai)	33,5			
11	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BRSDM (unit)	15	13	13	100
12	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRSDM dibandingkan Realisasi Anggaran BRSDM TA 2022 (%)	≤0,5			
13	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BRSDM (indeks)	75			
14	Nilai PM SAKIP BRSDM (nilai)	80,5			

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023	Target Triwulan I	Capaian Triwulan I	%
15	Nilai Struktur dan Proses Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BRSDM (nilai)	3,1			
16	Persentase Unit kerja Lingkup BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92	92	99,53	108,18
17	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BRSDM (%)	75	75	93,81	120
18	Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan BRSDM (%)	75			
19	Nilai IKPA Lingkup BRSDM (nilai)	89			
20	Nilai NKA Lingkup BRSDM (nilai)	86			
21	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup BRSDM (%)	77,5			
22	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BRSDM (%)	77,5			
23	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)	5.005	1.869	2.514	120

Sasaran Program 1

SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri

Indikator Kinerja 1

Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)

Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan KP yang terserap di dunia usaha dan dunia industri pada Tahun 2023, ditargetkan sebanyak 70 %. Indikator ini merupakan representasi dari jumlah lulusan pendidikan menengah dan vokasi KP yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan serta jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha yang menerapkan hasil pelatihan dan/atau bekerja di dunia usaha dan industri.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%) akan diukur pada Triwulan IV Tahun 2023.

Indikator Kinerja 2

Nilai PNBPN BRSDM (Rupiah Miliar)

Menurut UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu sumber penerimaan negara, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Target tahunan IKU ini adalah Rp.24,731 Miliar, dengan periode pengukuran adalah tahunan. Capaian IKU nilai PNBPN BRSDM akan dilakukan pengukuran pada Triwulan IV tahun 2023.

Sasaran Program 2

SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan)

Indikator Kinerja 3

Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)

Indikator ini untuk mengetahui berapa banyak lulusan satuan pendidikan dan pelatihan KP yang melakukan rintisan wirausaha dibidang kelautan dan perikanan yang membentuk start up. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) akan dilakukan pengukuran pada Triwulan IV tahun 2023.

Sasaran Program 3

Kelompok Kelautan dan Perikanan Mandiri yang Dibentuk

Indikator Kinerja 4

Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)

Jumlah kelompok KP yang dibentuk pada Tahun 2023 memiliki target sebanyak 3.000 kelompok setelah mendapatkan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan, dengan kriteria pembentukan kelompok mengacu pada KEPMEN KP No. 14 Tahun

2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (kelompok) pada Triwulan I adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian IKU 4

IKU-4. Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (kelompok)									
Realisasi TW I 2020-2022			2023					Renstra KKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	956	-	3.000	584	671	114,90	-	2.000	33,55

Capaian IKU Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (kelompok) pada Triwulan I tahun 2023 mencapai 671 Kelompok (114,90%) dari target 584 kelompok. Capaian ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun 2022, dikarenakan periode pengukuran pada tahun 2022 dihitung secara tahunan. Dibandingkan dengan target Renstra, presentase capaian sebesar 33,55%. Pembentukan kelompok ditandai dengan penerbitan sertifikat pengukuhan yang ditandatangani oleh pejabat wilayah setempat (lurah atau kepala desa) dan dilaporkan kepada Dinas yang menangani penyuluhan perikanan kabupaten/kota. Tercapainya IKU ini dikarenakan faktor intensitas kegiatan penyuluhan, antusiasme masyarakat untuk membentuk kelompok usaha perikanan/kelautan serta intervensi dari Balai/Satminkal dalam rangka percepatan pencapaian target. Sebaran kelompok yang dibentuk berdasarkan Satminkal, sebagai berikut:

Indikator Kinerja 5

Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)

IKU kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya berdasarkan KEPMEN KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Maka kelompok perikanan dibagi dalam 3 (tiga) kelas yaitu: (1) Kelas Pemula, merupakan kelas terbawah dan terendah dari segi kemampuannya, dengan batas nilai skoring penilaian 0 s.d. 350; (2) Kelas Madya, merupakan kelas menengah dimana kelembagaan pada kelas madya

sudah melakukan kegiatan perencanaan meskipun masih terbatas, dengan batas nilai skoring 351 s.d. 650; (3) Kelas Utama, merupakan kelas yang tertinggi dimana kelembagaan pada kelas utama sudah melakukan kegiatan dalam perencanaan sampai pelaksanaan meskipun masih terbatas, dengan batas nilai skoring 651 s.d. 1.000. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (kelompok) akan diukur pada Triwulan II Tahun 2023, karena pada awal tahun belum semua kelompok dapat dilakukan penilaian kelas kelompoknya, Penyuluh Perikanan pada periode ini masih pada tahap pendampingan kegiatan penyuluhan serta Surat Keputusan dan verifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pejabat Pemerintah Daerah belum ditetapkan.

Indikator Kinerja 6

Tenaga Kerja yang terlibat lingkup BRSDM (orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa maupun yang menerima manfaat dari sektor perikanan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tenaga Kerja yang terlibat lingkup BRSDM akan diukur pada Triwulan IV Tahun 2023.

Sasaran Program 4

Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat

Indikator Kinerja 7

Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (desa)

BRSDM sebagai penghasil inovasi teknologi dan sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing memiliki peran dalam pembangunan KP melalui transfer teknologi untuk meningkatkan daya saing perekonomian. Desa Mitra, atau selanjutnya disebut *Smart Fisheries Village* (SFV), adalah program yang dikembangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BRSDM untuk memperkuat kemandirian desa berbasis usaha perikanan. Pengembangan SFV bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, komunitas pekerja, pelestarian lingkungan dan penerapan teknologi digital. SFV juga merupakan model pengembangan desa perikanan pintar secara terintegrasi dengan berkolaborasi bersama banyak pihak terkait yaitu pemerintah pusat dan daerah, akademisi, industri, serta masyarakat. SMART sendiri

merupakan singkatan dari *Sustainable, Modernization, Acceleration, Regeneration*, dan *Technology*, sehingga melalui program ini diharapkan akan terbentuk desa-desa perikanan unggulan yang produktif, mampu menerapkan teknologi informasi, mandiri dan memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Target IKU Desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP pada tahun 2023 sebanyak 7 desa. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP akan diukur pada Triwulan IV tahun 2023.

Sasaran Program 5

Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan (unit)

Indikator Kinerja 8

Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)

Peningkatan kapasitas sarana berbentuk pengadaan fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh Pusat pendidikan dan pelatihan KP. Perhitungan pada IKU ini dilakukan dengan cara menjumlahkan sarana dan prasarana yang terbentuk pengadaan fisik/belanja modal. IKU ini bertujuan untuk menggambarkan kontribusi BRSDM KP dalam mendukung produktivitas sektor KP melalui pelaksanaan kebijakan riset dan SDM yang efektif dan kualitas pelaksanaan pengajaran di satuan pendidikan KP, Target capaian pada Tahun 2023 sebanyak 14 Unit. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya akan diukur pada Triwulan IV tahun 2023.

Sasaran Program 6

Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan

Indikator Kinerja 9

Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan (Kebijakan)

Rekomendasi kebijakan adalah proses untuk melakukan pilihan terhadap berbagai alternatif kebijakan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan (Subarsono, 2020). *Policy Brief* merupakan salah satu dokumen penyampaian hasil riset rekomendasi kebijakan berupa analisis/kajian berdasarkan data-data ilmiah yang

tersedia untuk menghasilkan rekomendasi terhadap isu strategis/kebijakan yang disajikan secara singkat (3-4 halaman) menampilkan opsi kebijakan, implikasi dan rekomendasi untuk *stakeholder* dalam pengambilan keputusan/kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang digunakan sebagai bahan kebijakan *stakeholder* merupakan dokumen rekomendasi (dalam bentuk *policy brief*) yang disampaikan kepada *stakeholder* melalui Surat dari Kepala BRSDM. Periode pengukuran IKU ini secara tahunan, dan akan dilakukan pengukuran pada Triwulan IV tahun 2023.

Sasaran Program 7

Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup BRSDM

Indikator Kinerja 10

Nilai PM PRB Lingkup BRSDM (nilai)

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan atau *business process*; dan (c) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi diperoleh melalui Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh tim KEMENPAN RB sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja manajerial (IKM) Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi BRSDM (Nilai) dilakukan secara tahunan.

Indikator Kinerja 11

Unit Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BRSDM (unit, kumulatif)

Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai jumlah unit kerja lingkup BRSDM yang berpredikat menuju WBK. Hal ini sebagai implementasi dari komitmen bersama seluruh Pejabat Eselon I untuk mewujudkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia).

Setiap unit kerja Eselon I lingkup KKP sebagai unit pembangun integritas berperan untuk mendorong terwujudnya WBK dan WBBM pada masing-masing unit kerjanya. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menetapkan satuan kerja untuk menjadi proyek percontohan. Penetapan Satker sebagai WBK tersebut dimaksudkan sebagai kompetisi dalam penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Satker di lingkungan BRSDM dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Capaian indikator kinerja unit berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) lingkup BRSDM Tahun 2017 sampai Tahun 2022 mencapai 13 Unit satker dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Satuan Kerja Lingkup BRSDM Berpredikat WBK

No	Satuan Kerja	Tahun Perolehan
1	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak	2017
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) Maros	2017
3	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) Gondol	2017
4	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal	2017
5	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waeheru	2018
6	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi	2018
7	Balai Riset Observasi Laut, Perancak	2019
8	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BPRPUPP) Palembang	2019
9	Balai Riset Pemuliaan Ikan Sukamandi	2021
10	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan	2021
11	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	2022
12.	Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta	2022
13.	Balai Diklat Aparatur Sukamandi	2022

Target IKM Unit Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BRSDM sebanyak 15 Unit. Capaian indikator kinerja ini pada Triwulan I merupakan capaian pada tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian IKM 11

IKU-11. Unit Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BRSDM (unit, kumulatif)									
Realisasi TW I 2020-2022			2023					Renstra KKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
8	8	10	15	13	13	100	30	13	100

Indikator Kinerja 12

Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup BRSDM (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK SETJEN merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Capaian atas indikator Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup BRSDM (%) akan diukur pada Triwulan IV tahun 2023.

Indikator Kinerja 13

Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BRSDM (indeks)

Indikator Indeks Profesionalitas ASN lingkup BRSDM merupakan Indikator yang dibentuk seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Iku ini diukur secara semesteran. Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BRSDM akan dilakukan pada Triwulan II.

Indikator Kinerja 14

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BRSDM (nilai)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.

Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/ daerah. Penilaian SAKIP di lingkup KKP sampai dengan tahun 2021, dilakukan berdasarkan Permen PAN RB 12 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan pada tahun 2023 penilaian SAKIP menggunakan peraturan baru dengan terbitnya Permen PAN RB nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan mendasar dalam penilaian SAKIP yaitu adanya penggabungan dan pembobotan dalam komponen penilaian, keselarasan cascading untuk melihat keselarasan kinerja organisasi, sistem reward and punishment, penambahan kriteria penilaian dari 5 menjadi 8 kriteria, serta orientasi penilaian lebih kearah dampak implementasi SAKIP atau outcome. Capaian IKM PM SAKIP akan diukur pada Triwulan IV tahun 2023.

Indikator Kinerja 15

Nilai Struktur dan Proses Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BRSDM (nilai)

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Level maturitas SPIP pada level 3 dapat dicirikan dari sejumlah indikator yaitu: kebijakan dan prosedur tertulis, pengkomunikasian kebijakan dan prosedur, dan Implementasi kebijakan dan

prosedur, serta dokumentasi. Capaian kinerja IKM ini akan diukur pada Triwulan IV tahun 2023.

Indikator Kinerja 16

Persentase unit kerja Lingkup BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

Indikator ini didefinisikan sebagai bagaimana pengetahuan dapat di sampaikan atau disebarakan dalam suatu media. Ruang lingkup manajemen pengetahuan di Tahun 2019 diterjemahkan sebagai tingkat penerapan MP di Level 1 KKP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, (bobot 20%) (ii) keikutsertaan (bobot 40%), (iii) keaktifan Pejabat/staf unit kerja level 1 dalam Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 40%).

Capaian IKU Persentase unit kerja BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian IKM 16

IKU-16. Presentase Unit Kerja lingkup BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (%)									
Realisasi TW I 2020-2022			2023					Renstra KKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
69,94	95,9	100	92	92	99,53	108,18	-0,47	90	110,59

Capaian IKM Persentase unit kerja BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) pada Triwulan 1 tahun 2023 mencapai 99,53% (108,18%) dari target 92%. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan 1 tahun 2022, terjadi penurunan sebesar -0,47 %. Dibandingkan dengan target Renstra, presentase capaian sebesar 110,59 %.

Dari data-data yang dijabarkan di atas, capaian tahun 2023 meraih keberhasilan disebabkan oleh:

- 1) Persentase nilai terbesar diperoleh dari Komponen penilaian Dokumen karena komponen ini yang menjadi nilai capaian BRSDM sudah terunggah dalam manajemen pengetahuan.

- 2) Persentase nilai terbesar diperoleh dari keikutsertaan karena Pimpinan dan Staff BRSDM sudah berkontribusi dalam keikutsertaan dari tahun sebelumnya.
- 3) Pimpinan Level 2, Koordinator dan Subkoordinator Lingkup Pusat BRSDM yang telah memberikan kontribusi pengetahuan berupa informasi dengan ketentuan 5W + 1H yang disebar dalam aplikasi Bitrix24.
- 4) Telah dilaksanakan monitoring dengan melakukan pertemuan rapat serta koordinasi dengan komunikasi langsung sebelum masa waktu.

Indikator Kinerja 17

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BRSDMKP (%)

Indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BRSDMKP merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh UPT lingkup BRSDM yang menjadi obyek pengawasan. Capaian atas indikator kinerja ini sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian IKM 17

IKU-17. Presentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BRSDMKP (%)									
Realisasi TW I 2020-2022			2023					Renstra KKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
83,93	75,76	92,75	75	75	93,81	120	1,14	80	117,86

Indikator Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BRSDMKP telah mencapai target yaitu 93,81(120) %) dari target 75. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan 1 tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 1,14%, dan dibandingkan dengan target Renstra BRSDM Tahun 2024 mencapai 117,86%. Capaian indikator kinerja ini didapatkan dari 113 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dari total 106 temuan awal, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Rincian Jumlah Tindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BRSDM

No	Satker Pusat (termasuk UPT)	Temuan Awal (Saran)	Tindak Lanjut (Saran)	%
1	Sekretariat	76	70	92,1
2	Pusdik KP	34	34	100
3	Puslatluh KP	1	1	100
4	Pusriskel	0	0	0
5	Pusriskan	2	1	50
6	BBRP2BKP	0	0	0
7	BBRSEKP	0	0	0
	SATKER	0	0	0
TOTAL		113	106	93,81

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BRSDMKP merupakan keberhasilan atas pengendalian intern terhadap faktor-faktor yang mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan antara lain komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian temuan serta inisiasi kegiatan seperti tindak lanjut temuan dengan melakukan pendampingan ke satuan kerja dan kegiatan tindak lanjut temuan yang diadakan secara regional dengan melibatkan tim Itjen KKP.

Indikator Kinerja 18

Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan BRSDM (%)

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (PermenPAN RB No. 30 Tahun 2014). Capaian Indikator Kinerja Hasil Proposal Inovasi pelayanan publik di lingkungan BRSDM akan diukur pada Triwulan IV tahun 2023.

Indikator Kinerja 19

Nilai IKPA Lingkup BRSDM (nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait

dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Penyerapan Anggaran (bobot 20%), Pengelolaan Uang Persediaan (10%) Penyelesaian Tagihan (20%) Deviasi Halaman III DIPA (11), Penyampaian Data Kontrak, Penyampaian LPJ Bendahara, Revisi DIPA, Pengembalian/Kesalahan SPM, Dispensasi SPM, Renkas/RPD Harian, Retur SP2D (masing masing 5%). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Capaian kinerja IKU Nilai IKPA Lingkup BRSDM akan diukur pada semester II Tahun 2023.

Indikator Kinerja 20
Nilai NKA Lingkup BRSDM (nilai)

Nilai NKA Lingkup BRSDM (nilai) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Capaian atas indikator kinerja Nilai NKA Lingkup BRSDM akan diukur pada Triwulan IV Tahun 2023.

Indikator Kinerja 21
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup BRSDM (%)

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023
 - a) Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2023 (5%).
 - b) Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam menyusun RKAKL Tahun 2023 (7,5%)
- 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan Triwulan III tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%).
- 3) Tersedianya usulan penghapusan BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai Triwulan III tahun 2023 (25%).
- 4) Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2021 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (25%).
- 5) Penyusunan/Penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (12,5%).

Capaian atas indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan BMN akan diukur pada Triwulan IV tahun 2023.

Indikator Kinerja 22
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BRSDM (%)

Tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BRSDM (%) diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1). Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis unit eselon 1 (10%), 2). Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (15%), 3). Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE (10%), 4). Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (45%), 5). Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa (5%), 6). Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2023 (15%). Capaian atas indikator kinerja tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa akan diukur pada Triwulan IV tahun 2023.

Indikator Kinerja 23
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)

Indikator Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang) merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Aparatur KKP yang telah dilatih dan jumlah Aparatur KKP yang melakukan peningkatan jenjang pendidikan formal tugas belajar untuk pendidikan S2 dan S3. Capaian atas indikator kinerja utama Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang) sebagai berikut:

Tabel 10. Capaian IKM 23

IKU-23. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (Orang)									
Realisasi TW I 2020-2022			2023					Renstra KKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	469	424	5.005	1.869	2.514	120	492,92	5.000	50,28

Indikator kinerja ini telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian sebanyak 5.005 orang (120% dari target Triwulan I 2023). Capaian ini terdistribusi atas orang peserta tugas dan ijin belajar KKP dan 99 orang dan 1.770 Orang jumlah

lulusan pelatihan aparatur KKP. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 492,92%. Terhadap target Renstra BRSDM Tahun 2024 capaian Triwulan I Tahun 2023 telah mencapai 50,28 %.

Dengan pengembangan metode pelatihan blended atau campuran antara metode pelatihan online dan offline. Disamping itu, dukungan tenaga widyaiswara yang kompeten serta sarana/prasarana pelatihan yang memadai sebagai penyebab utama keberhasilan pencapaian IKU. Peningkatan capaian pelatihan aparatur juga didukung oleh faktor para widyaiswara/instruktur di BDA Sukamandi yang telah memahami dan dapat beradaptasi dalam pemanfaatan platform MOOC (Massive Open Online Course) LAN-RI. Tingkat adaptasi dan pemahaman atas penggunaan platform yang baru ini juga mendukung tercapainya jumlah pelatihan aparatur KP, disamping penggunaan e-Milea yang merupakan platform utama untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan online di KKP.

Selain itu, terkait tugas dan ijin belajar, tercapainya indikator ini dikarenakan kerjasama dan koordinasi yang baik antara Pusat Pendidikan KP, Sekretariat BRSDM, Biro SDM Aparatur dan Organisasi KKP, eselon I lingkup KKP. Selain itu hal ini dapat tercapai karena pengawalan dan pendampingan baik dari Pusat Pendidikan KP, Biro SDM Aparatur dan Organisasi KKP, serta Eselon I lingkup KKP dalam melaksanakan dengan baik Keputusan Menteri terkait dengan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar maupun Izin Belajar.

3.3 Realisasi Anggaran BRSDM Tahun 2023

Penyerapan anggaran lingkup BRSDM Tahun 2023 data per tanggal 30 Maret 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Tabel Realisasi Anggaran BRSDM

SATUAN KERJA	Pagu Total	Realisasi Total	%	Sisa Total
SATKER PUSAT				
SEKRETARIAT BRSDM	98.159.565.000	13.944.745.645	14,21%	84.214.819.355
PUSAT RISET PERIKANAN	41.622.967.000	4.283.454.194	10,29%	37.339.512.806

SATUAN KERJA	Pagu Total	Realisasi Total	%	Sisa Total
	139.782.532.000	18.228.199.839	13,04%	121.554.332.161
SATKER DAYA SAING PRODUK & SOSIAL EKONOMI				
BBRPPBKP SLIPI	18.750.000.000	3.098.594.192	16,53%	15.651.405.808
BBRSEKP ANCOL	10.550.000.000	1.964.159.810	18,62%	8.585.840.190
	29.300.000.000	5.062.754.002	17,28%	24.237.245.998
UPT				
UPT PUSRISKEL	10.962.351.000	1.526.991.989	13,93%	9.435.359.011
UPT PUSRISKAN	356.654.062.000	58.093.448.745	16,29%	298.560.613.255
UPT PUSDIK	450.396.760.000	66.786.621.628	14,83%	383.610.138.372
UPT PUSLATLUH	396.541.461.000	64.956.133.852	16,38%	331.585.327.148
	1.214.554.634.000	191.363.196.214	15,76%	1.023.191.437.786
TOTAL BRSDM	1.383.637.166.000	214.654.150.055	15,51%	1.168.983.015.945

Realisasi anggaran BRSDM sebesar 15,51 % dengan tingkat konsistensi sebagaimana pada evaluasi Smart DJA 82,36 %. Ini menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan berdasarkan pada POK Pemetaan anggaran pendukung indikator kinerja BRSDM dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 12. Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	KODE	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	
1	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	2375.SCC.001	27.989.152.000	3.143.880.659	11,23
2	Nilai PNBP BRSDM (Rupiah Miliar)	2376.SAC.001	146.857.163.000	22.735.680.828	15,48
3	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	2375.AFA.001	2.030.000.000	202.825.689	9,99
		2375.ABW.002	1.017.156.000	92.004.520	9,05
		2375.BDJ.001	4.000.000.000	189.580.899	4,74
		2375.DCC.001	745.200.000	30.566.000	4,10
		2376.AFA.001	1.000.000.000	174.107.591	17,41
		2376.ABW.001	1.800.000.000	272.503.760	15,14

INDIKATOR KINERJA		KODE	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	
4	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)	2375.QDD.001	76.950.000.000	11.352.728.984	14,75	
5						Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)
6						Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRSDM (orang)
7	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (Desa Perikanan Pintar) (desa)	2375.QDD.002	8.000.000.000	92.644.227	1,16	
		2375.QJA.001	1.500.000.000	-	-	
		2376.QDD.001	1.243.338.000	275.889.366	22,19	
8	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	2375.RAL.001	4.794.502.000	1.243.347.970	25,93	
		2375.RBQ.001	1.440.000.000	344.149.400	23,90	
		2376.RAA.001	8.734.920.000	-	0,00	
		2376.RBJ.001	39.199.519.000	1.133.598.267	2,89	
9	Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan (Kebijakan)	6703.AFA.001	4.673.250.000	-	-	
		6703.RAN.001	700.000.000	-	-	
10	Nilai PM PRB Lingkup BRSDMKP (nilai)	2378.EBD.974	781.540.000	278.689.336	35,66	
		2378.EBA.994	989.462.966.000	163.561.590.524	16,53	
		2378.EBA.962	10.189.544.000	2.192.871.931	21,52	
11	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BRSDMKP (unit)	2378.EBA.957	450.000.000	36.688.250	8,15	
		2378.EBA.960	970.000.000	51.319.143	5,29	
12	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRSDM dibandingkan Realisasi Anggaran BRSDM TA 2022 (%)	2378.EBD.955	5.918.893.000	1.395.567.506	23,58	
15						Nilai Struktur dan Proses Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BRSDM (nilai)

INDIKATOR KINERJA		KODE	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	
17	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BRSDMKP (%)					
19						Nilai IKPA Lingkup BRSDM (nilai)
20						Nilai NKA Lingkup BRSDM (nilai)
21	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup BRSDM (%)	2378.EBA.956	2.126.688.000	206.500.724	9,71	
22	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BRSDM (%)	2378.EBB.951	1.400.000.000	929.310.000	66,38	
		2378.EBB.971	1.200.000.000		0,00	
13	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BRSDM (indeks)	2378.EBC.954	3.382.686.000	716.878.483	21,19	
14	Nilai PM SAKIP BRSDM (nilai)	2378.EBD.952	7.722.824.000	1.105.691.143	14,32	
		2378.EBD.953	7.104.873.000	480.029.243	6,76	
16	Persentase Unit kerja Lingkup BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	2378.EBA.963	1.502.950.000	234.391.178	15,60	
		2378.FAB.001	501.000.000	103.000.000	20,56	
18	Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan BRSDM (nilai)	2378.EBA.958	6.449.002.000	382.319.474	5,93	
		2378.CAN.001	300.000.000			
23	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)	4345.EBC.996	11.500.000.000	1.695.794.960	14,75	
	Total Anggaran BRSDM		1.383.637.166.000	214.654.150.055	15,51	

Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya BRSDM

Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan

yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/program dan tingkat satuan kerja/kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (*output*) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (*output*) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Penghitungan nilai efisiensi ini telah tersedia berbasis sistem dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi Smart DJA.

Tabel 13. Perhitungan Efisiensi Anggaran BRSDM 2023.

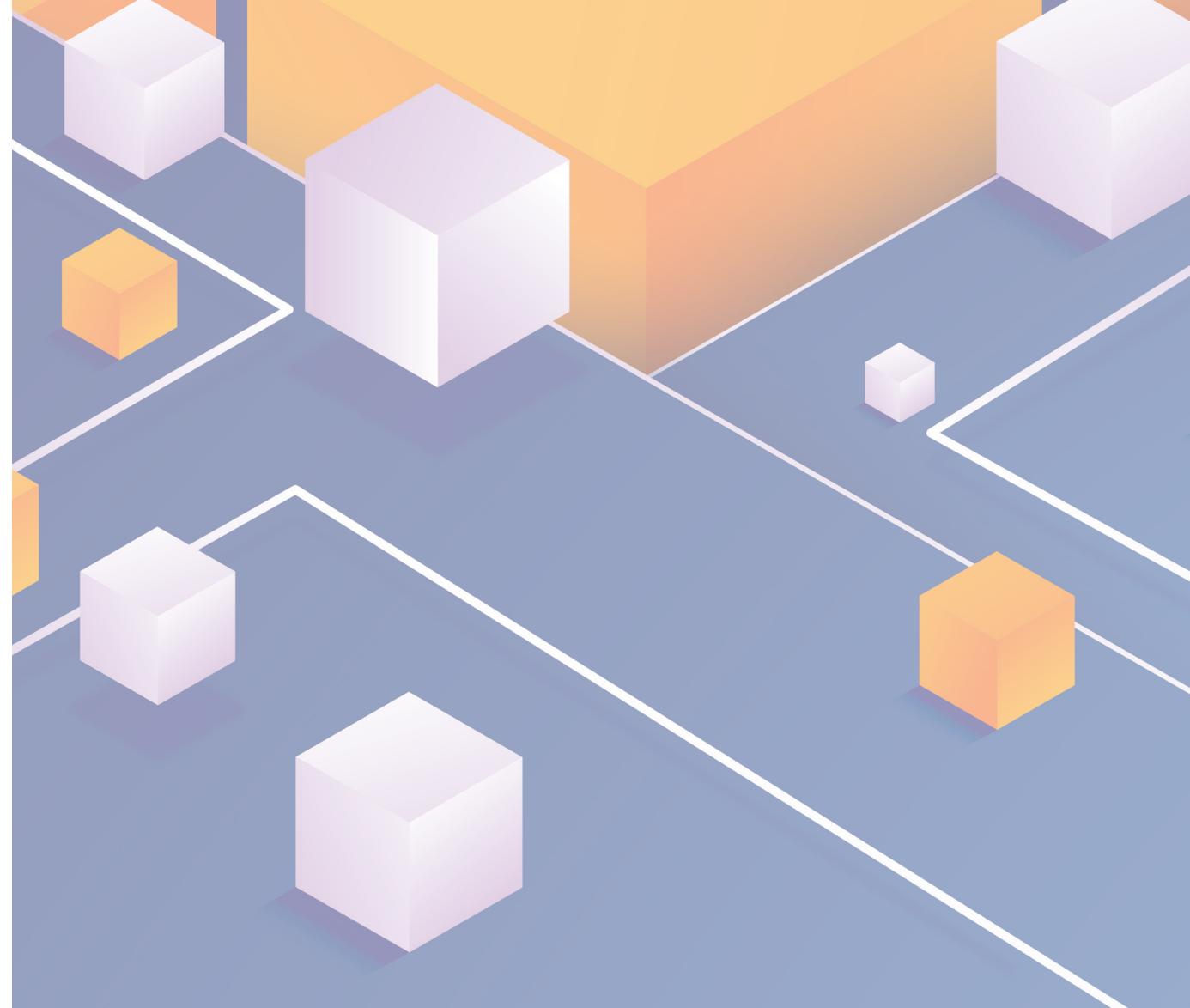
Capaian Sasaran Program	Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran Program	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	22,95	82,36	1	-20	0

Efisiensi anggaran BRSDM memperoleh skor -20. Pencapaian efisiensi sebesar -20 menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan anggaran pada Triwulan I 2023 belum menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Tingkat efisiensi baik efisiensi keluaran

maupun efisiensi kegiatan pada level minus. Hal ini karena nilai efisiensi dihitung dari perolehan efisiensi. Dimana rentang efisiensi dari -20 sampai +20. Kondisi ini tentu perlu mendapatkan perhatian dan pengawalan secara baik dalam rangka peningkatan kinerja dan konsistensi terhadap pelaksanaan anggaran pada Triwulan berikutnya, sehingga diperoleh nilai efisiensi positif (+20).



Halaman Kosong

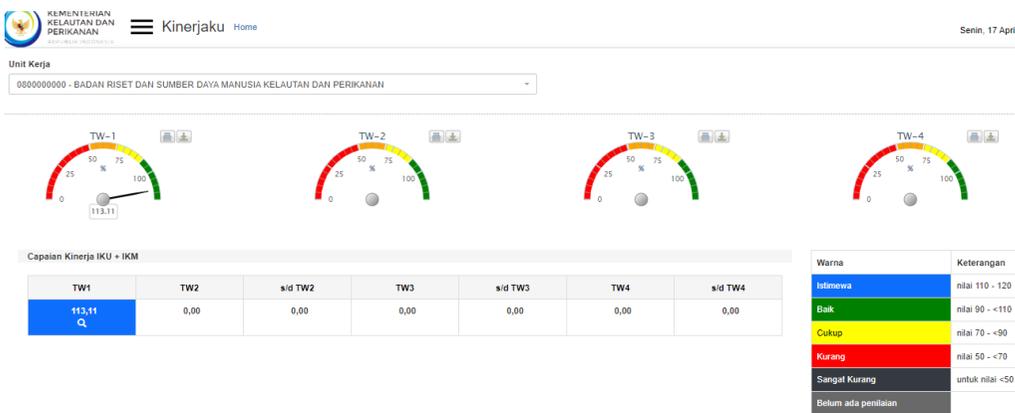


Bab IV Penutup

- 4.1. Capaian Kinerja Utama
- 4.2. Permasalahan dan Rekomendasi

4.1 Kesimpulan

Pada tahun 2023, BRSDM memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 7 Sasaran Program dan 9 Indikator Kinerja Utama serta 14 Indikator Kinerja Manajerial. Pengukuran capaian kinerja BRSDM tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRSDM pada Triwulan Tahun 2023 sebesar 113,11 %, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 5. Capaian Kinerja BRSDM Triwulan I Tahun 2023

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, dari 23 Indikator Kinerja yang menjadi target BRSDM, terdapat 3 Indikator Kinerja berstatus biru dan 2 Indikator Kinerja capaian hijau atau telah mencapai/melampaui dari target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja BRSDM Triwulan I Tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok) dengan target triwulan I sebanyak 584 Kelompok dan capaian sebesar 671 Kelompok (114,90%);
- 2) Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BRSDM (unit) dengan target triwulan I sebanyak 13 unit dan capaian 13 unit (100%);

- 3) Persentase Unit kerja Lingkup BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) dengan target triwulan I sebanyak 92% dan capaian sebesar 99,53% (108,18);
- 4) Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BRSDM (%) dengan target triwulan I sebanyak 75% dan capaian sebesar 93,81% (120%);
- 5) Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang) dengan target triwulan I sebanyak 1.869 orang dan capaian sebesar 2.514 orang (120%).

4.2 Permasalahan dan Rekomendasi

Secara umum kinerja BRSDM cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

IKU dengan Capaian Triwulan Melampaui Target Tahunan

Terdapat 2 Indikator Kinerja Utama dengan capaian melampaui target tahunannya, yaitu Persentase unit kerja Lingkup BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dan Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BRSDM. Terhadap capaian atas indikator ini diharapkan tidak terjadi penurunan pada triwulan berikutnya.

IKU dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IKU agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders* BRSDM. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BRSDM. Akhirnya, BRSDM berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.



Lampiran



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Kusdiantoro**

Jabatan : Plt. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Plt. Kepala Badan Riset dan Sumber
Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Kusdiantoro

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
PROGRAM 1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				
SP1.1	SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	ISP1.1.1	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	65
SP1.2	SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk Start Up (Usaha Rintis) (orang)	ISP1.2.1	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	369
SP1.3	Kelompok Kelautan dan Perikanan Mandiri yang Dibentuk	ISP1.3.1	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)	3.000
		ISP1.3.2	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)	1.800
SP1.4	Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat	ISP1.4.1	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (desa)	7
SP1.5	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan	ISP1.5.1	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan (unit)	13
PROGRAM 2. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan ^{b,c)}				
SP2.1	Hasil Perumusan Kebijakan dan Inkubator Bisnis Kelautan dan Perikanan yang mendukung kesejahteraan masyarakat	ISP2.1.1	Hasil Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan (perumusan kebijakan) ^{b,c)}	21
		ISP2.1.2	Hasil Inkubator Bisnis KP yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat (start up) ^{b,c)}	6
PROGRAM 3. Program Riset dan Inovasi IPTEK^{a)}				
SP3.1	Hasil riset yang dimanfaatkan oleh sektor industri	ISP3.1.1	Hasil riset yang dimanfaatkan oleh sektor industri (hasil riset) ^{a)}	2
SP3.2	Hasil riset KP yang digunakan dalam penyusunan kebijakan	ISP3.2.1	Data, Informasi dan Peta hasil riset KP yang digunakan dalam penyusunan kebijakan (hasil riset) ^{a)}	11
		ISP3.2.2	Rekomendasi potensi sumber daya perikanan yang terpetakan dan berkelanjutan pada 11 WPP (kajian) ^{a)}	3

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
PROGRAM 4. Program Dukungan Manajemen^{c)}				
SP4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BRSDM	SP4.1.1	Nilai PM PRB Lingkup BRSDM (nilai)	32
		SP4.1.2	Unit Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BRSDM (unit, kumulatif)	11
		SP4.1.3	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup BRSDM (%)	≤1
		SP4.1.4	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BRSDM (indeks)	74
		SP4.1.5	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BRSDM (nilai)	86,25
		SP4.1.6	Maturitas SPIP Lingkup BRSDM (level)	3
		SP4.1.7	Unit kerja Lingkup BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	86
		SP4.1.8	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BRSDMKP (%)	70
		SP4.1.9	Unit kerja Lingkup BRSDM yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1
		SP4.1.10	Nilai IKPA Lingkup BRSDM (nilai)	89
		SP4.1.11	Nilai NKA Lingkup BRSDM (nilai)	86
		SP4.1.12	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup BRSDM (%)	75
		SP4.1.13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BRSDM (%)	75
SP4.2	Aparatur Yang Dididik dan Dilatih	SP4.2.1	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)	4.960
SP4.3	Ekonomi Sektor KP meningkat lingkup BRSDM	SP4.3.1	Nilai PNPB BRSDM (Rupiah Miliar)	15,45
		SP4.3.2	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRSDM (orang)	14.082

Data Anggaran

NO.	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp.000)
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	273.074.994
	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	162.468.938
	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	110.606.056
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan^{b, c)}	24.015.000
	Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan ^{b, c)}	10.565.000
	Inkubasi Bisnis Kelautan dan Perikanan ^{b, c)}	8.400.000
	Pengujian Kelayakan Teknologi Kelautan dan Perikanan ^{b, c)}	1.200.000
	Analisis Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan ^{b, c)}	3.850.000
3	Program Riset dan Inovasi IPTEK^{a)}	26.735.000
	Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP ^{a)}	2.100.000
	Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan ^{a)}	350.000
	Riset Perikanan ^{a)}	20.150.000
4	Program Dukungan Manajemen^{c)}	1.051.277.205
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BRSDMKP	1.041.277.205
	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	10.000.000
Total Anggaran Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2022		1.375.102.199,-

^{a)} Blokir

^{b)} Output cadangan

^{c)} Automatic Adjustment

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Plt. Kepala Badan Riset dan Sumber
Daya Manusia Kelautan dan Perikanan



Kusdiantoro



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Mei 2022

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

I Nyoman Radiarta

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
PROGRAM 1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi ^{c)}				
SP1.1	SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	1	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	65
		2	Nilai PNBPR BRSDM (Rupiah Miliar)	15,45
SP1.2	SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan)	3	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	369
SP1.3	Kelompok Kelautan dan Perikanan Mandiri yang Dibentuk	4	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)	3.000
		5	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)	1.800
		6	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRSDM (orang)	14.082
SP1.4	Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat	7	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (desa)	7
SP1.5	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan ^{c)}	8	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	26
PROGRAM 2. Program Riset dan Inovasi IPTEK^{a)}				
SP2.1	Hasil riset yang dimanfaatkan oleh sektor industri	1	Hasil riset yang dimanfaatkan oleh sektor industri (hasil riset) ^{a)}	2
SP2.2	Hasil riset KP yang digunakan dalam penyusunan kebijakan	2	Data, Informasi dan Peta hasil riset KP yang digunakan dalam penyusunan kebijakan (hasil riset) ^{a)}	11
		3	Rekomendasi potensi sumber daya perikanan yang terpetakan dan berkelanjutan pada 11 WPP (kajian) ^{a)}	3

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
PROGRAM 3. Program Dukungan Manajemen^(c)				
SP3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BRSDM	1	Nilai PM PRB Lingkup BRSDM (nilai)	32
		2	Unit Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BRSDM (unit, kumulatif)	11
		3	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup BRSDM (%)	≤1
		4	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BRSDM (indeks)	74
		5	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BRSDM (nilai)	86,25
		6	Maturitas SPIP Lingkup BRSDM (level)	3
		7	Unit kerja Lingkup BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	86
		8	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BRSDM (%)	70
		9	Unit kerja Lingkup BRSDM yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1
		10	Nilai IKPA Lingkup BRSDM (nilai)	89
		11	Nilai NKA Lingkup BRSDM (nilai)	86
		12	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup BRSDM (%)	75
		13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BRSDM (%)	75
		14	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)	4.960

Data Anggaran		
NO.	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp.000)
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi^(c)	299.482.754
	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	162.468.938
	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan ^(c)	134.621.056
	Badan Layanan Umum	2.392.760
2	Program Riset dan Inovasi IPTEK^(a)	26.735.000
	Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP ^(a)	2.100.000
	Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan ^(a)	350.000
	Riset Perikanan ^(a)	20.150.000
	Riset Kelautan ^(a)	4.135.000
4	Program Dukungan Manajemen^(c)	1.051.428.241
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BRSDMKP	1.041.363.991
	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	10.000.000
	Badan Layanan Umum	64.250
Total Anggaran Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2022		1.377.645.995,-

^(a) Blokir

^(c) Automatic Adjustment

Jakarta, 9 Mei 2022

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Pihak Kesatu
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan


Sakti Wahyu Trenggono


I Nyoman Radiarta



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2022 DAN TRIWULANAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan kinerja Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 dan Triwulanan Tahun 2023 agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk tim penyusun laporan kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 dan Triwulanan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2022 DAN TRIWULANAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 dan Triwulanan Tahun 2023 selanjutnya disebut sebagai Tim Penyusun LKj BRSDM, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun LKj BRSDM sebagaimana dimaksud dikum KESATU mempunyai tugas:
- A. Pengarah
Memberikan arahan kebijakan, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas pelaksanaan kegiatan.
- B. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan dukungan manajemen.
- C. Koordinator
Bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan kinerja.
- D. Ketua
Bertanggung jawab terhadap penyelesaian pelaksanaan kegiatan termasuk penyiapan bahan, pengumpulan capaian kinerja dan bukti dukung serta penyusunan laporan kinerja.
- E. Anggota
1. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
 2. Mengumpulkan capaian kinerja dan bukti dukung atas capaian kinerja BRSDM; dan
 3. Menyusun buku laporan kinerja BRSDM Tahun 2022 dan Triwulanan Tahun 2023.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dikum KEDUA, Tim Penyusun LKj BRSDM bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET
 DAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KELAUTAN DAN PERIKANAN
 NOMOR 14 TAHUN 2023
 TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
 BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2022
 DAN TRIWULANAN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA BRSDM
 TAHUN 2022 DAN TRIWULANAN TAHUN 2023

- A. PENGARAH
Kepala BRSDM
- B. PENANGGUNG JAWAB
 1. Sekretaris BRSDM
 2. Kepala Pusat Riset Perikanan;
 3. Kepala Pusat Riset Kelautan;
 4. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
 5. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
 6. Kepala Balai Besar Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan; dan
 7. Kepala Balai Besar Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.
- C. KOORDINATOR
Tri Yuwono, S.Pi., M.Si (Perencana Muda, Sekretariat BRSDM)
- D. KETUA
Rahmadi Sunoko, S.Pi., M.Sc. (Analisis Kebijakan Muda, Sekretariat BRSDM)

E. ANGGOTA

No.	Nama	Jabatan
1.	Dewi Rukmasari, S.Pi.	Perencana Muda, Sekretariat BRSDM
2.	Eka Sunahwati, S.Pi., M.Si.	Analisis Perencanaan, Sekretariat BRSDM
3.	Ir. Andi Soesmono, M.EM.	Analisis Kebijakan Muda, Sekretariat BRSDM
4.	Siti Amania Raydesyana, S.Kom.	Pranata Humas Muda, Sekretariat BRSDM
5.	Asep Sutiana, S.St.Pi., M.Si.	Statistisi Muda, Sekretariat BRSDM
6.	Liana Sari, S.T., M.Si.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Madya, Sekretariat BRSDM

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 6 Januari 2023
 KEPALA BADAN RISET
 DAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

I NYOMAN RADIARTA

Sekretaris Badan Riset dan
 Sumber Daya Manusia KP



Kusdiantoro

No.	Nama	Jabatan
7.	Putut Erie Sudjito, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda, Sekretariat BRSDM
8.	Wawan Nurliansyah, S.St.Pi., M.Si.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda, Sekretariat BRSDM
9.	Hari Purwanto, S.Pi., M.AP.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda
10.	Sutopo, S.Pi.	Analisis Kepegawaian Muda
11.	Drs Mas Adi Pranggono, MM	Perencana Madya, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP
12.	Supriyadi, S.Pi	Perencana Muda, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP
13.	Norma Maria Pricielya Manoppo, S.Pi, M.Si.	Perencana Madya, Pusat Pendidikan KP
14.	Suryat Dedie Susena, S.Pi., M.A.	Perencana Muda, Pusat Pendidikan KP
15.	Erish Widjanarko, S.T.	Perencana Madya, Pusat Riset Kelautan
16.	Joko Hardono, S.Si., M.E.	Perencana Muda, Pusat Riset Kelautan
17.	Dra Endang Sriyati	Perencana Madya, Pusat Riset Perikanan
18.	Sugesti Titik Maryati, S.E.	Perencana Muda, Pusat Riset Perikanan
19.	Fenni Eddrisea, SP., M.Si.	Perencana Muda, BBRSEKP
20.	Zilfia Nora, S.Pi., M.Si.	Perencana Muda, BBRPPBKP
21.	Ridona Viju Rafeliandi, A.Md., S.Kom.	Pranata Komputer Utama, Sekretariat BRSDM
22.	Desianti Yuanita, S.I.Kom.	Analisis Monev, Pusat Pendidikan KP
23.	Ary Budhy Purwoko, S.AP.	Analisis Monev, Pusat Penyuluhan dan Pelatihan KP
24.	Muthia Khelfa Pramesti, S.Si.	Pengelola Program dan Anggaran BBRPPBKP
25.	Nurma Yunita D., S.E.	Pelaksana Seksi Monev BBRSEKP
26.	Sari Novita, S.T.	Pengadministrasi Seksi Monev, Pusat Riset Kelautan
27.	Ir.Yuli Setiawati.M.M	Analisis Monev, Sekretariat BRSDM

No.	Nama	Jabatan
28.	Rahayu Boru Sirait,A.Md	Pelaksana Subkoordinator Pelaporan, Sekretariat BRSDM
29.	Ferliana Widyasari	Analisis Monev, Sekretariat BRSDM

KEPALA BADAN RISET
DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

I NYOMAN RADIARTA

Sekretaris Badan Riset dan
Sumber Daya Manusia KP

Kusdiantoro

